



**mPEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jalan : Soekarno Hatta Malili,
Email: pariwisataluwutimur@gmail.com
Website: www.ayokeluwutimur.id
MALILI 92981

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR: 800 / 68 / Disparmudora / VIII / 2023

**TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa sehubungan ditetapkannya Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 126/D17/III/Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat pengelola Layanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Pariwisata Kepemudaan Dan olahraga Kabupaten Luwu Timur
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270).
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 48670).
 - 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4899).
 - 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 - 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
 - 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149).
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191).
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170).
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27).
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80).
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat lainnya Tahun Anggaran 2022.

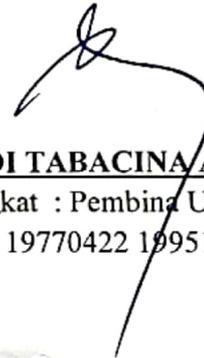
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU SERTA PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu serta membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Komunikasi.
- KeEDUA** : Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas :
- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya.
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
 - c. Meminjam ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi Pemohon Informasi secara cepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan Prima.
 - d. Mengumpulkan, Mengelola dan Mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur menjadi bahan informasi publik.
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan Pelayanan Informasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertanggung jawab kepada atasan langsungnya.

- KEEMPAT : Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibantu oleh tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KETUJUH : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku ditetapkan pada tanggal.

Malili, 15 Agustus 2023

Kepala Dinas



ANDI TABACINA AKHMAD, S.STP.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP. 19770422 199511 2 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili.
3. Inspektur Kabupaten Luwu Timur di Malili.
4. Masing-masing bersangkutan.

STRUKTUR ORGANISASI

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAHA

